



## Implementasi Program Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Pasuruan Jawa Timur

Wilujeng Prihatin<sup>1\*</sup>, Amirul Mustofa<sup>2</sup>, Eny Haryati<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Dr. Sutomo, Indonesia

\*Penulis korespondensi: [wilujengprihatin4@gmail.com](mailto:wilujengprihatin4@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to analyze the implementation of social rehabilitation programs for persons with physical disabilities at the Social Affairs Office of Pasuruan City, East Java. Persons with physical disabilities face various challenges in accessing public services and participating in social life, thus requiring comprehensive rehabilitation programs. Using the implementation theory of George C. Edward III, this study examines four critical factors: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This qualitative research employs a descriptive approach with data collection through in-depth interviews, participant observation, and documentation study. Informants include officials from the Social Affairs Office, rehabilitation program staff, persons with physical disabilities as program beneficiaries, and community members. The results indicate that the implementation of social rehabilitation programs has been running according to established procedures, including physical rehabilitation services, vocational training, and social assistance provision. However, several obstacles were identified, including limited budget allocation, inadequate accessibility of rehabilitation facilities, shortage of trained social workers, and lack of public awareness regarding disability issues. The program has successfully provided assistive devices to 85 beneficiaries and vocational training to 60 persons with physical disabilities in 2023. This study recommends strengthening coordination between related agencies, increasing budget allocation, improving facility accessibility, and conducting socialization to enhance community participation in supporting persons with physical disabilities.*

**Keywords:** *Persons with Disabilities; Physical Disability; Policy Implementation; Social Rehabilitation; Social Welfare.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Dinas Sosial Kota Pasuruan, Jawa Timur. Penyandang disabilitas fisik menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses layanan publik dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, sehingga memerlukan program rehabilitasi yang komprehensif. Menggunakan teori implementasi dari George C. Edward III, penelitian ini mengkaji empat faktor kritis: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan meliputi pejabat Dinas Sosial, staf program rehabilitasi, penyandang disabilitas fisik sebagai penerima manfaat program, dan anggota masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program rehabilitasi sosial telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, meliputi layanan rehabilitasi fisik, pelatihan vokasional, dan pemberian bantuan sosial. Namun, beberapa kendala teridentifikasi, termasuk alokasi anggaran yang terbatas, aksesibilitas fasilitas rehabilitasi yang tidak memadai, kekurangan pekerja sosial terlatih, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai isu disabilitas. Program ini telah berhasil memberikan alat bantu kepada 85 penerima manfaat dan pelatihan vokasional kepada 60 penyandang disabilitas fisik pada tahun 2023. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar instansi terkait, peningkatan alokasi anggaran, perbaikan aksesibilitas fasilitas, dan pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyandang disabilitas.

**Kata kunci:** Disabilitas Fisik; Implementasi Kebijakan; Kesejahteraan Sosial; Penyandang Disabilitas; Rehabilitasi Sosial.

### 1. LATAR BELAKANG

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu

lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Republik Indonesia, 2016). Di Indonesia, menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022, terdapat sekitar 22,97 juta penduduk atau 8,5% dari total penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas (Badan Pusat Statistik, 2023).

Penyandang disabilitas fisik merupakan salah satu kategori penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan fungsi gerak, termasuk amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil (Kementerian Sosial RI, 2021). Kelompok ini memerlukan perhatian khusus dalam hal penyediaan layanan rehabilitasi sosial untuk membantu mereka mencapai kemandirian dan partisipasi sosial yang optimal. Rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat (Astuti, 2020).

Kota Pasuruan sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Pasuruan tahun 2023, tercatat sebanyak 1.247 penyandang disabilitas, dengan 423 orang atau 33,9% di antaranya merupakan penyandang disabilitas fisik yang tersebar di empat kecamatan (Dinas Sosial Kota Pasuruan, 2023). Jumlah ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas fisik merupakan kelompok yang signifikan dan memerlukan program rehabilitasi sosial yang terencana dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Sosial telah menyelenggarakan berbagai program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik, meliputi pemberian alat bantu (kursi roda, kruk, kaki/tangan palsu), pelatihan keterampilan vokasional, bantuan sosial berupa uang tunai dan sembako, serta pendampingan sosial. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas fisik agar mampu hidup mandiri dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat (Pemerintah Kota Pasuruan, 2022). Namun demikian, implementasi program masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dikaji secara komprehensif.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Rahmawati dan Suryono (2021) menemukan bahwa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas program rehabilitasi. Sementara itu, Widyastuti dan Pratama (2022) menyatakan bahwa aksesibilitas fasilitas rehabilitasi dan stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas masih menjadi tantangan serius dalam

penyelenggaraan program. Penelitian Kusumawati (2020) juga mengidentifikasi bahwa koordinasi antar instansi dalam penanganan penyandang disabilitas belum berjalan optimal.

Gap analysis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah banyak penelitian tentang program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, namun kajian spesifik tentang implementasi program di Kota Pasuruan dengan menggunakan teori implementasi Edward III belum pernah dilakukan. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala implementasi program serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Dinas Sosial Kota Pasuruan dengan fokus pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (dalam Winarno, 2021). Implementasi melibatkan berbagai aktor, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Agustino, 2020).

George C. Edward III mengembangkan model implementasi kebijakan yang mengidentifikasi empat faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi atau sikap (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Keempat faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam proses implementasi kebijakan (Edward III dalam Subarsono, 2020). Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada pelaksana dan kelompok sasaran secara jelas, konsisten, dan tepat waktu. Kejelasan dan konsistensi pesan sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan.

Faktor sumber daya mencakup ketersediaan staf yang memiliki keahlian dan kemampuan yang diperlukan, informasi yang relevan tentang cara mengimplementasikan kebijakan, kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta fasilitas yang diperlukan termasuk anggaran (Nugroho, 2022). Tanpa sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan akan mengalami kesulitan bahkan kegagalan. Disposisi mengacu pada sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Pelaksana yang

memiliki disposisi positif akan melaksanakan kebijakan dengan sepenuh hati, sementara disposisi negatif dapat menghambat implementasi (Wahab, 2021).

Struktur birokrasi berkaitan dengan karakteristik, norma, dan pola hubungan yang terjadi berulang dalam badan-badan pelaksana yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Dua aspek penting dalam struktur birokrasi adalah Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP diperlukan untuk menyeragamkan tindakan pelaksana dalam situasi yang kompleks dan tersebar luas, sementara fragmentasi dapat menghambat koordinasi dan menyebabkan pemborosan sumber daya (Dunn, 2018; Indiahono, 2022).

Rehabilitasi sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas meliputi motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan rujukan (Kementerian Sosial RI, 2021).

Model sosial disabilitas menekankan bahwa hambatan yang dialami penyandang disabilitas bukan berasal dari kondisi individu, melainkan dari lingkungan sosial yang tidak inklusif dan tidak akomodatif. Perspektif ini mendorong perubahan paradigma dalam penanganan disabilitas dari pendekatan charity-based menjadi rights-based yang mengakui hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara (Shakespeare, 2020). Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas (Irwanto & Thohari, 2021).

Penelitian Hidayat dan Syamsudin (2022) tentang implementasi program rehabilitasi sosial di Kota Malang menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh komitmen kepala daerah dan koordinasi lintas sektor. Sejalan dengan itu, Pratiwi dan Handoyo (2021) menemukan bahwa partisipasi aktif keluarga dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi penyandang disabilitas. Sementara itu, Setiawan (2023) menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas (Community Based Rehabilitation/CBR) dalam program rehabilitasi sosial untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena sosial secara mendalam, khususnya terkait implementasi program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Pasuruan. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Creswell & Poth, 2023; Sugiyono, 2021).

Lokasi penelitian bertempat di Dinas Sosial Kota Pasuruan, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Dinas Sosial merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian juga dilakukan di beberapa lokasi tempat tinggal penerima manfaat program untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang implementasi program. Penelitian dilaksanakan selama empat bulan, dari bulan Februari hingga Mei 2024.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari: Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, petugas lapangan/pendamping sosial, penyandang disabilitas fisik sebagai penerima manfaat program (sebanyak 10 orang), keluarga penerima manfaat, serta tokoh masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, laporan tahunan Dinas Sosial, data statistik penyandang disabilitas, dan dokumen pendukung lainnya (Miles, Huberman, & Saldana, 2020).

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang dikembangkan berdasarkan empat dimensi teori implementasi Edward III. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan program rehabilitasi sosial, kondisi fasilitas, dan interaksi antara petugas dengan penerima manfaat. Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data pendukung dari berbagai sumber tertulis (Yin, 2022).

Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari tiga tahap: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Kondensasi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan matriks. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan temuan-

temuan di lapangan dan melakukan verifikasi secara terus-menerus (Miles et al., 2020). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check untuk memastikan kredibilitas hasil penelitian.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Gambaran Umum Program Rehabilitasi Sosial

Dinas Sosial Kota Pasuruan menyelenggarakan program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik melalui Bidang Rehabilitasi Sosial. Program ini bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas fisik agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan data tahun 2023, terdapat 423 penyandang disabilitas fisik yang terdaftar di Kota Pasuruan, dengan 185 orang atau 43,7% di antaranya telah menerima layanan rehabilitasi sosial dalam berbagai bentuk (Dinas Sosial Kota Pasuruan, 2023).

##### Aspek Komunikasi dalam Implementasi Program

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi program rehabilitasi sosial di Kota Pasuruan telah berjalan cukup baik melalui berbagai saluran. Sosialisasi program dilakukan melalui pertemuan dengan kelurahan, puskesmas, dan organisasi penyandang disabilitas. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam hal jangkauan sosialisasi yang belum merata ke seluruh wilayah, terutama di daerah pinggiran. Informan dari kalangan penyandang disabilitas menyatakan bahwa mereka mengetahui program ini dari tetangga atau petugas kelurahan, bukan dari sosialisasi langsung Dinas Sosial. Hal ini sejalan dengan temuan Widyastuti dan Pratama (2022) yang menekankan pentingnya strategi komunikasi yang efektif untuk menjangkau kelompok sasaran.

**Tabel 1.** Data Penerima Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Pasuruan Tahun 2021-2023.

Tahun	Alat Bantu	Pelatihan Vokasi	Bantuan Sosial	Pendampingan	Total
2021	65	40	120	25	250
2022	72	50	135	30	287
2023	85	60	150	35	330

Sumber: Dinas Sosial Kota Pasuruan.

##### Aspek Sumber Daya dalam Implementasi Program

Sumber daya merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya dalam implementasi program rehabilitasi sosial di Kota Pasuruan masih menghadapi beberapa kendala. Dari aspek sumber

daya manusia, Bidang Rehabilitasi Sosial hanya memiliki 8 orang staf termasuk 3 orang pekerja sosial yang harus menangani seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), tidak hanya penyandang disabilitas. Rasio pekerja sosial dengan penyandang disabilitas fisik yang harus ditangani adalah 1:141, jauh dari standar ideal 1:50 yang direkomendasikan oleh Kementerian Sosial (Handayani & Suryanto, 2021).

Dari aspek anggaran, alokasi dana untuk program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas pada tahun 2023 sebesar Rp 380.000.000, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 320.000.000. Namun, jumlah ini dinilai belum memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan program. Sebagian besar anggaran terserap untuk pengadaan alat bantu, sementara program pelatihan vokasional dan pendampingan masih sangat terbatas. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada minimnya fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di kantor Dinas Sosial, seperti tidak tersedianya ram untuk pengguna kursi roda dan toilet yang belum ramah disabilitas (Rahmawati & Suryono, 2021).

### **Aspek Disposisi dalam Oplementasi Program**

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum para pelaksana program memiliki komitmen yang baik dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas fisik. Para petugas memahami pentingnya program rehabilitasi sosial dan berupaya memberikan pelayanan terbaik meskipun dengan keterbatasan yang ada. Namun demikian, masih ditemukan sebagian petugas yang belum memahami sepenuhnya kebutuhan khusus penyandang disabilitas fisik. Beberapa informan dari kalangan penerima manfaat menyatakan bahwa petugas kadang kurang sabar dalam memberikan penjelasan dan pelayanan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas petugas dalam hal pemahaman disabilitas dan etika pelayanan (Pratiwi & Handoyo, 2021).

### **Aspek Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program**

Struktur birokrasi berkaitan dengan karakteristik organisasi pelaksana, termasuk SOP dan fragmentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Pasuruan telah memiliki SOP untuk program rehabilitasi sosial yang mengatur prosedur pendaftaran, verifikasi, pelayanan, dan monitoring. Namun, SOP ini belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam proses pelayanan. Proses administrasi yang masih mengharuskan kehadiran fisik penerima manfaat tanpa alternatif layanan jemput bola menjadi kendala bagi penyandang disabilitas berat yang kesulitan berpergian (Indiahono, 2022).

Koordinasi lintas sektor dalam penanganan penyandang disabilitas juga belum berjalan optimal. Meskipun telah ada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan PMKS tingkat kota, namun pertemuan koordinasi yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, dan instansi terkait lainnya masih jarang dilakukan. Fragmentasi ini menyebabkan penanganan penyandang disabilitas tidak terintegrasi dan cenderung parsial. Penelitian Kusumawati (2020) juga menemukan hal serupa bahwa koordinasi antar instansi dalam penanganan penyandang disabilitas masih menjadi tantangan utama di berbagai daerah.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi**

Berdasarkan analisis implementasi, terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan program yaitu adanya payung hukum yang jelas berupa UU Nomor 8 Tahun 2016 dan peraturan turunannya, komitmen pimpinan daerah dalam alokasi anggaran yang meningkat setiap tahun, dukungan dari organisasi penyandang disabilitas (PPDI Kota Pasuruan) dalam pendataan dan sosialisasi program, serta partisipasi aktif kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran yang belum proporsional dengan jumlah sasaran, minimnya sumber daya manusia terlatih terutama pekerja sosial, belum aksesibelnya fasilitas pelayanan, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan masih adanya stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang menghambat partisipasi sosial mereka (Setiawan, 2023; Irwanto & Thohari, 2021).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Dinas Sosial Kota Pasuruan menggunakan teori implementasi Edward III, dapat disimpulkan bahwa program telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan dengan capaian yang meningkat setiap tahunnya. Dari aspek komunikasi, sosialisasi program telah dilakukan namun jangkauan belum merata ke seluruh wilayah. Dari aspek sumber daya, keterbatasan anggaran, SDM terlatih, dan fasilitas aksesibel masih menjadi kendala utama. Aspek disposisi menunjukkan bahwa pelaksana memiliki komitmen yang baik meskipun pemahaman tentang kebutuhan khusus disabilitas perlu ditingkatkan. Dari aspek struktur birokrasi, SOP telah tersedia namun belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas, sementara koordinasi lintas sektor masih perlu diperkuat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal untuk meningkatkan efektivitas implementasi program. Pertama, penguatan strategi komunikasi melalui sosialisasi yang lebih masif dengan memanfaatkan berbagai media termasuk media sosial dan melibatkan organisasi penyandang disabilitas sebagai mitra strategis. Kedua, peningkatan alokasi anggaran untuk program rehabilitasi sosial dengan proporsi yang lebih besar untuk pelatihan vokasional dan pendampingan berkelanjutan. Ketiga, penambahan jumlah pekerja sosial dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan tentang pemahaman disabilitas dan pelayanan yang inklusif. Keempat, perbaikan aksesibilitas fasilitas pelayanan publik termasuk kantor Dinas Sosial sesuai dengan standar aksesibilitas universal. Kelima, penguatan koordinasi lintas sektor melalui pertemuan rutin Tim Koordinasi dan pengembangan sistem database terpadu penyandang disabilitas. Keenam, pelaksanaan kampanye publik untuk mengurangi stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Keterbatasan penelitian ini adalah cakupan yang terbatas pada satu kota saja, sehingga penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan membandingkan implementasi program di beberapa daerah untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang praktik baik dan tantangan dalam penanganan penyandang disabilitas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial Kota Pasuruan atas kesediaannya menjadi lokasi penelitian dan memberikan data serta informasi yang diperlukan. Terima kasih juga disampaikan kepada Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Pasuruan dan seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan bagian dari program penelitian dosen yang didanai oleh Universitas Yudharta Pasuruan.

## DAFTAR REFERENSI

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi revisi). Alfabeta.
- Astuti, M. (2020). Kondisi penyandang disabilitas fisik dan program rehabilitasi sosial berbasis masyarakat. *Jurnal Sosio Konsepsia*, 9(2), 155–168. <https://doi.org/10.33007/ska.v9i2.1897>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik penduduk penyandang disabilitas 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

- Dinas Sosial Kota Pasuruan. (2023). *Laporan tahunan program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas tahun 2023*. Dinas Sosial Kota Pasuruan.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Handayani, R., & Suryanto, T. (2021). Analisis kebutuhan sumber daya manusia dalam pelayanan sosial penyandang disabilitas. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 22(1), 45–60. <https://doi.org/10.7454/jurnalks.v22i1.267>
- Hidayat, A., & Syamsudin, M. (2022). Implementasi program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 78–92. <https://doi.org/10.21776/jap.2022.12.1.05>
- Indiahono, D. (2022). *Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis* (Edisi revisi). Gava Media.
- Irwanto, & Thohari, S. (2021). Hak penyandang disabilitas dalam perspektif hukum dan HAM. *Jurnal HAM*, 12(2), 189–204. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.189>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman rehabilitasi sosial penyandang disabilitas*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kusumawati, D. (2020). Koordinasi antar lembaga dalam penanganan penyandang disabilitas di daerah. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 8(2), 112–128. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v8i2.967>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, R. (2022). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, dan manajemen politik kebijakan publik* (Edisi revisi). Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Kota Pasuruan. (2022). *Rencana aksi daerah penyandang disabilitas Kota Pasuruan tahun 2022–2024*. Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.
- Pratiwi, A., & Handoyo, S. (2021). Peran keluarga dan masyarakat dalam rehabilitasi penyandang disabilitas. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 34–48. <https://doi.org/10.14421/jpm.2021.61-04>
- Rahmawati, D., & Suryono, A. (2021). Efektivitas program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas: Studi kasus di Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Negara*, 27(3), 267–284. <https://doi.org/10.33509/jan.v27i3.1345>
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Sekretariat Negara.
- Setiawan, B. (2023). Rehabilitasi berbasis komunitas untuk penyandang disabilitas: Pendekatan dan implementasi. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(1), 56–72. <https://doi.org/10.29313/jsh.v7i1.10234>
- Shakespeare, T. (2020). *Disability rights and wrongs revisited* (2nd ed.). Routledge.

- Subarsono, A. G. (2020). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi* (Edisi revisi). Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik* (Edisi revisi). Bumi Aksara.
- Widyastuti, E., & Pratama, R. (2022). Aksesibilitas dan stigma dalam pelayanan rehabilitasi penyandang disabilitas. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 4(2), 89–104. <https://doi.org/10.15575/jks.v4i2.14532>
- Winarno, B. (2021). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus* (Edisi revisi). CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Yin, R. K. (2022). *Case study research and applications: Design and methods* (7th ed.). SAGE Publications.